

**EKSISTENSI POLITISI TIONGHOA DI KOTA SEMARANG  
TAHUN 2024**

**Anna Maria Citra Dwiyanti**

Email : [annamariacitra2@gmail.com](mailto:annamariacitra2@gmail.com)

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon: (024) Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Fenomena etnis Tionghoa berkecimpung dalam politik mengalami adanya peristiwa dan dinamika yang dirasakan oleh masyarakat etnis Tionghoa dari masa Orde Lama hingga saat ini yang menunjukkan adanya pergerakan, dengan mendobrak persepsi politik mengenai keetnisan dalam partisipasi politik. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk melihat dinamika dan proses masyarakat etnis Tionghoa serta eksistensinya dalam politik di Kota Semarang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Politik Identitas dari Pierre Van Den Bergh dan teori Jaringan Aktor dari Michael Callon dan Bruno Latour. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dan data yang diperoleh yakni melalui studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi dengan para politisi Tionghoa serta pengurus partai politik dan menggunakan metode *purposive sampling*. Selain itu penelitian ini menggunakan dokumentasi pendukung dari berbagai sumber seperti jurnal dan artikel ilmiah untuk memperkuat hasil analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena eksistensi etnis Tionghoa dalam politik di Kota Semarang telah mengalami peningkatan yang signifikan, bahwa melalui pendekatan Primordialisme, pendekatan Transaksionalisme, dan pendekatan Instrumentalisme pada teori Politik Identitas dapat dikatakan mendukung eksistensi para politisi Tionghoa untuk membangun jaringan dukungan melalui Jaringan Sosial dan Jaringan Politik yang kemudian dapat menciptakan Modal Sosial yang besar diantara sesama etnis Tionghoa dengan memanfaatkan adanya identitas dan solidaritas etnik serta menciptakan Modal Politik dengan adanya transaksi politik dengan konstituen nya untuk dapat terpilih kembali. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa stigma politik mengenai politisi Tionghoa dalam politik di Kota Semarang sudah tidak menjadi isu atau polemik yang dapat dijadikan sebuah celah perpecahan dengan kondisi masyarakat yang multikultural. Sehingga hal ini juga menjadi upaya para politisi Tionghoa untuk menjaga keberlanjutan aktor dan eksistensinya dalam konteks politik.

Kata Kunci : Eksistensi; Tionghoa; Politisi; Politik Identitas; Jaringan Aktor

## **ABSTRACT**

*The Chinese ethnic phenomenon in politics is experiencing events and dynamics perceived by Chinese people from the old order to the present that indicates movement, by breaking down political perceptions about the composition of political participation. So it was aimed at seeing the dynamics and processes of ethnic Chinese people and their existence in the politics of the Semarang City. The theory used in this study is the political theory of the identity of Pierre Van Den Bergh, the network of actors from Michael Callon and Bruno Latour. The methods used in the study are descriptive qualitative methods, and the data obtained through library studies, interviews, and documentation with Chinese politicians and political party administrators and wielding sampling methods. In addition, the study uses supporting documentation from various sources such as journals and scientific articles to strengthen analysis results.*

*Studies have shown that the phenomenon of ethnic Chinese presence in politics in the city of Semarang has improved significantly, that through Primordialism approaches, Transactionalism approaches, and Instrumentalism approaches to the political theory of identity can be argued for the existence of Chinese politicians to build a network of support through Social Networks and Political Networks that could later create substantial social capital among Chinese people using ethnic identity and solidarity.*

*The conclusion of the study is that there is a political stigma on Chinese politicians in the politics of the city of Semarang that is no longer a issue or a polemic that could lead to a problem in the multicultural world. So it is also the Chinese politicians' attempt to keep the actors and existence in political context.*

*Keywords: Existence; Chinese; Politicians; Political Identity; Actors network*

## **PENDAHULUAN**

Tersebarnya masyarakat dengan suku, ras, dan etnis menjadikan adanya identitas etnis atau etnisitas dan terbentuknya politik identitas dan politik etnis. Identitas etnis sendiri dikategorikan oleh kelompok berdasarkan hubungan keluarga, budaya, dan agama. Identitas etnis menjelaskan bahwa kelompok dan individu dibangun berdasarkan pengalaman (subjektivitas) dan sejarah (objektivitas). Sedangkan politik identitas sendiri dapat diartikan sebagai tindakan politis yang mengedepankan kepentingan anggota dari suatu kumpulan karena adanya kesamaan identitas atau karakteristik, baik itu kesamaan ras, etnisitas, gender, dan keagamaan

(Triyono,2008). Berbagai etnis yang menetap di Indonesia beberapa diantaranya adalah etnis pendatang yang salah satunya adalah etnis Tionghoa. Berbicara tentang masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia, partisipasi dan eksistensi etnis Tionghoa dalam partai politik di Indonesia sejak masa kolonial hingga era reformasi mengalami sebuah adanya dinamika politik di dalamnya.

Eksistensi etnis Tionghoa diawali pada era Orde Baru yang dimana saat Soeharto mengerahkan tindakan-tindakan represif pasca peristiwa Gerakan 30 September dengan munculnya kampanye serta aksi anti-Tionghoa di berbagai daerah yang disertai dengan tindakan penjarahan,

pembakaran dan perusakan rumah serta toko dan sekolah. Tindakan-tindakan ini yang menjadikan diskriminasi etnis Tionghoa yang sangat mencolok, dengan ruang gerak yang dibatasi dalam bidang politik, sosial dan budaya. Adanya regulasi dari pemerintah Orde Baru untuk melakukan fusi untuk partai politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berlatarbelakang dan bercorak Islam, Partai Demokrasi Perjuangan (PDI) yang berpedoman Nasionalis serta Golongan Karya (Golkar), tanpa adanya partai politik yang bercorak etnis membuat masyarakat etnis Tionghoa ini menjadi kehilangan wadah dan kesempatan untuk berpartisipasi. Dikarenakan dinamika politik yang tambah diperparah dengan adanya tekanan yang besar terhadap masyarakat Tionghoa sejak awal Orde Baru, hal inipun juga berdampak pada hubungan antara Indonesia dengan Cina. Namun, setelah adanya perbaikan hubungan Indonesia Cina pada tahun 1991, terdapat peluang dan kesempatan bagi masyarakat etnis Tionghoa dalam bidang politik, seperti dengan munculnya dan terpilihnya Bob Hasan sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan saat itu, walaupun masih bisa dikatakan bahwa keterlibatan peran politik dan eksistensi etnis Tionghoa masih sangat kecil dan terbatas.

Kebangkitan demokrasi pasca runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998

meluapkan semangat etnis Tionghoa dalam berpolitik. Pelaksanaan pemilu 1999, terdapat beberapa partai yang menggunakan latar belakang etnis Tionghoa yakni Partai Pembauran Indonesia (Parpindo), Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (Parti) dan Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI). Dilansir dari Artikel Indonesia Media, hanya PBI yang lolos verifikasi Departemen Hukum dan HAM yang mampu menempatkan satu orang di kursi DPR. Partai politik yang berlandaskan etnis dan digiatkan oleh warga etnis Tionghoa di Indonesia dianggap kurang prospektif. Masalah etnis memang merupakan hal yang sensitif karena bergesekan dengan nilai SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Kusuma dan Satya (2006: 65) menyatakan bahwa pada pemilu setelah Orde Baru walaupun ada partai politik yang didirikan oleh masyarakat Tionghoa, atau partai politik yang terbuka untuk masyarakat Tionghoa dapat bergabung di dalamnya, sebagian besar masyarakat Tionghoa masih menunjukkan sikap monoloyalitasnya terhadap partai politik. Sehingga pada Pemilu 1999, partai politik seperti Parti dan Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI) tidak cukup mendapat suara. Eksistensi dan keterlibatan masyarakat etnis Tionghoa dalam pemilu 1999 masih dikatakan belum maksimal, namun dengan terpilihnya Kwik Kian Gie yang maju sebagai DPR melalui Partai Tionghoa sehingga pada akhirnya

diangkat menjadi Menteri (Jawa Pos: 2016). Melalui Kwik Kian Gie sebagai tonggak estafet eksistensi dari masyarakat etnis Tionghoa dalam berkancah di bidang politik.

Dari sekian peristiwa dan dinamika yang sampai hari ini dirasakan oleh masyarakat etnis Tionghoa dalam berpartisipasi menunjukkan adanya pergerakan, dengan mendobrak stigma politik nasional mengenai 'etnis' dan partisipasi masyarakat Indonesia yang tidak berbau politik identitas. Keberagaman yang sudah melebur juga membantu adanya kesempatan untuk masyarakat etnis Tionghoa dalam berpartisipasi di dunia politik bahkan kontestasi politik, dengan melihat perjuangan anggota legislatif yang berasal dari kota Semarang. Dari beberapa hasil temuan sebelumnya menunjukkan bahwa sepanjang sejarah Indonesia, dinamika politik yang diterima oleh etnis Tionghoa telah mengalami banyak proses termasuk kekerasan rasial, diskriminasi, dan marginalisasi yang mengakibatkan pada proses dan lembaga politik dan akibatnya adalah minimnya peran dan partisipasi etnis Tionghoa dalam politik nasional. Namun pada tiap masa, sejak zaman Orde Baru hingga Pasca Reformasi, menunjukkan bahwa sebuah sistem sosial mengalami dinamika dan proses sesuai dengan sistem politik yang berlaku saat itu, dan adanya dinamika itulah memiliki perbedaan dengan

adanya interaksi dan interdependensi etnis Tionghoa dalam partai politik yang akhirnya mampu menunjukkan sebagai bagian dari kemajemukan masyarakat Indonesia dalam berpartisipasi.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian dalam peristiwa sosial yang digambarkan secara terperinci dari data yang didapatkan pada informan untuk memecahkan sebuah permasalahan yang sedang diteliti. Subjek penelitian yakni individu dalam hal ini didefinisikan sebagai seorang informan guna menanyakan langsung mengenai topik yang akan dibahas. Subjek penelitian terdiri dari dua kategori utama, yaitu Politisi Tionghoa dan Pengurus Partai. Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah :

1. Politisi Tionghoa
  - a. Seorang politisi Tionghoa sebagai anggota Komisi C DPRD Kota Semarang.
  - b. Seseorang politisi Tionghoa., sebagai anggota Komisi C DPRD Kota Semarang dari salah satu partai politik besar.
  - c. Seseorang dengan profesi dokter umum yang pernah berkiprah dalam pencalonan anggota DPR RI, sebagai anggota salah satu partai baru.

- d. Seseorang politisi Tionghoa sebagai anggota Komisi D DPRD Kota Semarang dari salah satu partai politik besar.
2. Pengurus Partai
    - a. Seseorang sebagai anggota Komisi D DPRD dan Wakil Ketua Bidang di salah satu partai politik besar.
    - b. Seseorang sebagai anggota Komisi D DPRD Kota Semarang dan Wakil Ketua DPD salah satu partai politik.

Teknik pengambilan informan secara *purposive sampling*. Dalam kategori informan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dalam kontribusi mereka dalam dunia politik, sehingga memberikan perspektif yang sejalan dan signifikan dalam melihat dinamika politisi Tionghoa dalam politik. Melalui informan yang sudah ditentukan, menjadikan penelitian ini bisa menekankan pada kecukupan data dan memperoleh data yang komprehensif sehingga data yang diperoleh penulis bisa dikatakan sebagai data jenuh. Data Primer diperoleh dari observasi, hasil wawancara dan dokumentasi/foto secara langsung dengan informan serta penelaah lebih lanjut. Data Sekunder adalah data yang didapat dari berbagai macam data yang dipublikasikan melalui internet dan dibaca. Penelitian seperti bacaan literatur, buku referensi, jurnal ilmiah, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat mempermudah proses penyusunan dan

pembuatan laporan penelitian ini. Data dikumpulkan melalui :

1. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian terkait hal-hal yang ingin diteliti, yakni dinamika keterlibatan dan proses para politisi Tionghoa terjun dalam kontestasi politik.
2. Dokumentasi yang digunakan dapat berupa jurnal, teks tertulis, gambar atau foto, maupun berita yang berkaitan dengan topik peneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena eksistensi etnis Tionghoa dalam politik di Kota Semarang telah mengalami peningkatan yang signifikan, bahwa melalui faktor utama dari adanya Eksistensi yang menciptakan adanya pendekatan Primordialisme, pendekatan Transaksionalisme, dan pendekatan Instrumentalisme pada teori Politik Identitas dapat dikatakan mendukung eksistensi para politisi Tionghoa untuk membangun jaringan dukungan melalui Jaringan Sosial, Jaringan Politik, dan Jaringan Ekonomi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Eksistensi yang dikemukakan oleh Max Weber mengenai eksistensi, bahwasannya eksistensi dilihat sebagai sebuah keberadaan yang berdaya dan

eksistensi tercipta juga dalam bentuk keberadaan dan berpengaruh. Terdapat tiga indikator penting dalam tujuh indikator mengenai eksistensi.

### **Eksistensi suatu Kelompok dalam Politik**

#### 1. Suara dan Kepentingan Komunitas yang Terwakili melalui Representasi Politik

Keberadaan para politisi Tionghoa dalam lembaga-lembaga politik, seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) bukan hanya sebagai simbol, melainkan cerminan nyata sebagai masyarakat etnis Tionghoa yang mampu mengartikulasikan aspirasi, melindungi kepentingan, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Peran dari representasi politik ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan melalui hal ini mampu menciptakan siklus positif di mana semakin banyak individu Tionghoa yang termotivasi untuk terlibat dalam politik. Dalam representasi politik bukan hanya sekadar angka, melainkan indikator dinamis yang mencerminkan tingkat partisipasi, pengaruh, dan penerimaan politisi Tionghoa yang menegaskan eksistensi para politisi Tionghoa dalam sistem politik Kota Semarang.

#### 2. Partisipasi politik dengan lebih sekadar memilih

Melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum, pencalonan diri sebagai langkah awal yang fundamental dengan kesediaan politisi Tionghoa mencalonkan diri dalam

pemilihan umum, baik sebagai calon anggota legislatif maupun sebagai calon kepala daerah. Hal ini menunjukkan keberanian dan komitmen para politisi Tionghoa untuk masuk ke arena politik formal. Selain itu, dengan menjadi anggota dalam partai politik menunjukkan bahwa keikutsertaan politisi Tionghoa dalam politik membuktikan afiliasi ideologi dan kesediaan untuk bekerja dalam kerangka organisasi politik yang lebih besar. Selain itu, dengan mendapatkan kedudukan posisi penting dalam struktur kepemimpinan partai ini juga menunjukkan adanya tingkat kepercayaan dan pengaruh dari para politisi Tionghoa dalam partai.

#### 3. Menjadi Agenda-Setting Power melalui Pengambilan Keputusan

Adanya akses terhadap pengambilan keputusan bagi para politisi Tionghoa di Kota Semarang bukan sebagai kehadiran secara nominal, namun sebagai cerminan dari kekuatan politik nyata untuk tidak hanya menyuarakan aspirasi, tetapi juga mengubah aspirasi menjadi sebuah kebijakan dan tindakan nyata yang berdampak positif bagi sesama masyarakat etnis Tionghoa secara lebih luas di Kota Semarang. Semakin besar akses para politisi Tionghoa terhadap pusat pengambilan keputusan, semakin kuat pula eksistensi dan pengaruh politik komunitas Tionghoa di Kota Semarang.

## **Politik Identitas dalam Eksistensi**

Analisis yang digunakan dalam pembahasan ini penulis menggunakan Teori Politik Identitas yang dikembangkan oleh Pierre Van Den Bergh dalam (Mayssara, 2014:22). yang menyebutkan terdapat tiga indikator kunci dalam mengamati politik identitas dalam eksistensi etnis ini yaitu pendekatan primordialisme, transaksionalisme, dan instrumentalisme.

### **1. Kesadaran sebagai Identitas yang Melekat melalui Pendekatan Primordialisme**

Gambaran identitas etnis Tionghoa di Kota Semarang dapat kita lihat bersama dalam akulturasi budaya yang bahwasannya etnis Tionghoa di Kota Semarang telah mengalami akulturasi secara signifikan dengan budaya Jawa, selain itu sebagian besar masyarakat etnis Tionghoa di Kota Semarang adalah peranakan yang merupakan keturunan melalui perkawinan campur antara pendatang Tionghoa dengan penduduk lokal. Tak hanya itu dengan adanya Kawasan Pecinan di Kota Semarang yang merupakan pusat perdagangan, historis, dan simbol identitas etnis Tionghoa. Dan di Kawasan Pecinan ini aktivitas tradisi, budaya, dan ekonomi etnis Tionghoa juga masih sangat terasa, dan klenteng-klenteng kuno juga masih menjadi pusat untuk kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat etnis Tionghoa di Kota Semarang. dinamika bentuk solidaritas

dari etnis Tionghoa ini dapat ditunjukkan dengan adanya ikatan primordialisme yang dapat memperkuat adanya identitas etnis yakni; *Pertama*, bentuk afiliasi etnis Tionghoa dengan menggunakan model kekerabatan dan sesama organisasi yang dapat dilihat melalui perkumpulan Tionghoa seperti PSMTI (Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia). Melalui jejaring sosial ini mampu mewujudkan dan memperkuat bentuk solidaritas dalam komunitas. Dengan adanya heterogenitas Tionghoa di Kota Semarang dapat menciptakan sebuah kekuatan politik dan modal sosial yang besar melalui adanya sebuah perkumpulan atau paguyuban. *Kedua*, melalui kegiatan ekonomi, dan budaya yang terpusat di Kawasan Pecinan yang bahwasannya letak Kawasan Pecinan ini cukup dekat dengan pusat perkumpulan dan wilayah tempat tinggal masyarakat etnis Tionghoa di Kota Semarang. Melalui adanya kegiatan dan aktivitas ekonomi seperti transaksi jual beli dan aktivitas budaya seperti Cap Go Meh atau Imlek menjadi momen penting yang secara tidak langsung memberikan kontribusi positif bagi masyarakat etnis Tionghoa Kota Semarang untuk memperkuat solidaritas internal dan sebagai bentuk penerimaan dari kelompok etnis lain. Sikap primordial yang melekat dalam diri politisi dan dianggap bukan menjadi sebuah tantangan yang menakutkan tapi justru malah

menjadikan sebuah keterlibatannya berdampak dan membawa perubahan.

## 2. Kebermanfaatan dalam Karir Politik melalui Pendekatan Transaksionalisme

Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh politisi Tionghoa ini menjadi bentuk perwujudan kebijakan atau program yang relevan pula dengan kepentingan masyarakat. Pada kegiatan politik tersebut tak banyak juga melibatkan masyarakat etnis Tionghoa pula didalamnya seperti kegiatan “Bazar Sembako Murah & Pasar Takjil” yang dilaksanakan pada 20 April 2022 oleh salah satu politisi Tionghoa. Dengan kegiatan politik yang sifatnya transaksional ini pun juga menciptakan interaksi dengan seluruh lapisan masyarakat dalam Dapil yang dibawah oleh politisi Tionghoa ini, baik interaksi secara langsung maupun dalam jejaring *online*. Melalui kegiatan politik yang telah dilakukan dapat menciptakan adanya interaksi ataupun *respon* dari masyarakat terkhusus masyarakat Dapil yang menyambut dengan tangan terbuka dan merasakan adanya kebermanfaatan melalui sosok politisi Tionghoa dalam politik. Yang bahwasannya hal ini juga menunjukkan bahwa politisi Tionghoa ini sudah “ngopeni” masyarakat Dapil nya dengan baik dan merata tanpa pandang bulu. Selain itu, interaksi secara langsung yang dapat kita lihat bersama yakni melalui adanya Reses yang diberikan

oleh politisi Tionghoa kepada wilayah Dapil yang juga menjadi kesempatan masyarakat untuk mengutarakan segala kebutuhan masyarakat dan menjadi wadah politisi ini untuk menampung segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Politisi Tionghoa dapat memanfaatkan ikatan ini untuk menggalang dukungan dan suara dari masyarakat dalam kontestasi politik. Sehingga dengan pendekatan transaksional ini juga bisa dikatakan bahwa identitas etnis tidak selalu menjadi penentu utama, tetapi menjadi sumber daya yang strategis dalam dinamika kontestasi politik. Keuntungan dari kebermanfaatan politisi Tionghoa ini bisa berupa materi dengan bantuan yang diberikan untuk masyarakat, dukungan dari masyarakat untuk perolehan suara dan ujung tombaknya pada kekuasaan yang diraih oleh politisi Tionghoa, dan hal ini dimobilisasi untuk mencapai tujuan dan termasuk ke dalam strategi meraih dan mempertahankan eksistensi dalam kekuasaan. Selain perolehan dukungan dan suara yang diperoleh melalui mobilisasi identitas etnis, para politisi Tionghoa juga dapat memperluas jaringan dukungannya melalui aliansi dengan tokoh masyarakat atau kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang yang beragam di Kota Semarang.

## 3. Konstruksi Etnisitas dalam Pendekatan Instrumentalisme

Dalam pendekatan instrumental ini melihat bahwa etnis Ini dianggap sebagai sumber

kekuatan sosial, budaya dan politik dari berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat. Satu hal yang bisa terjadi adalah kompetisi bagi kelompok tertentu untuk mempelajari sumber dukungan besar. Konstruksi etnis pada pendekatan ini menggali lebih dalam bahwa etnisitas sebagai alat yang dapat digunakan secara strategis oleh para politisi Tionghoa untuk tujuan berupa kekuasaan politik, atau mobilisasi dukungan massa. Pendekatan instrumental lebih berfokus pada kepentingan material sebagai pendorong utama mobilisasi etnis. Hal ini dapat dilakukan para politisi Tionghoa dengan penguatan identitas etnis sebagai sumber daya politik. Politisi Tionghoa dapat menggunakan simbol, bahasa, dan budaya Tionghoa secara strategis dengan tujuan untuk memperkuat rasa identitas pada konstituen wilayah Dapil para politisi Tionghoa. Proses ini mampu menciptakan ikatan primordial dengan mengedepankan emosional dan kebersamaan yang dimobilisasi untuk dukungan politik. Dalam pembahasan mengenai pendekatan instrumental ini posisi keetnisan dalam pemilihan akan dianggap menonjol dengan melihat latar belakang para aktor yang terlibat. Dengan hal ini dapat dibagi menjadi dua perspektif; yakni bahwa faktor etnis sangat berpengaruh dalam perilaku pemilih dalam proses pemilihan, dan bahwa faktor etnis tidak terlalu mempengaruhi perilaku

pemilih dalam proses pemilihan. Namun berdasarkan dinamika yang terjadi di Kota Semarang konstruksi etnis masih ditunjukkan namun tidak terlalu menonjolkan atau memperlihatkan keetnisan yang digunakan untuk alat mobilisasi politik, karena apabila adanya konstruksi di wilayah yang majemuk akan menjadi konflik yang sensitif antara masyarakat mayoritas dengan masyarakat minoritas di dalamnya. Dalam dinamika kontestasi politik di Kota Semarang adanya pelaksanaan konstruksi keetnisan dalam kontestasi masih dalam batas normal dan tidak melampaui batas tanpa menyebabkan adanya isu yang dapat memecah kemajemukan masyarakat di kota Semarang. Para politisi Tionghoa lebih mengandalkan kepada strategi dan upaya pendekatan ke masyarakat dengan membangun dukungan berbasis akar rumput, kepercayaan, dan mengandalkan dukungan sukarela daripada dukungan yang dibeli. Hal ini mampu merepresntasikan faktor keberhasilan para politisi Tionghoa dalam mobilisasi dukungan, dengan adanya citra baik berupa kualitas politisi Tionghoa.

### **Jaringan Aktor dalam Eksistensi**

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan teori Jaringan Aktor yang dikembangkan oleh beberapa pendapat tokoh diantaranya Michael Callon, Bruno Latour yang menyampaikan bahwa indikator dari jaringan sosial, politik, dan

ekonomi sebagai kategori yang tidak terpisah dari Jaringan Aktor itu sendiri.

### 1. Rasa Kedekatan dan Kepercayaan (*Trust*) dalam Jaringan Sosial

Jaringan sosial menjadi salah satu pondasi penting bagi eksistensi etnis, dengan adanya kekuatan dan karakteristik dalam jaringan sosial yang dimiliki oleh para politisi Tionghoa mampu mempengaruhi keberuntungan dari kelompok etnis tersebut. Diawali dari relasi sosial terkecil para politisi Tionghoa yakni keluarga/komunitas dan lingkungan masyarakat yang berupaya memperkuat adanya eksistensi etnis Tionghoa. Sebagai halnya seperti para politisi Tionghoa yang sama-sama berangkat dari satu komunitas yang sama, yakni PSMTI (Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia) yang dengan ini mereka memilih untuk menonjolkan identitas etnis mereka hingga sampai ke birokrasi pemerintahan saat ini. Tak hanya itu, dengan melalui relasi sosial yang terjaga dengan seluruh masyarakat luas baik itu masyarakat etnis Tionghoa yang ada di dalamnya menciptakan adanya kepercayaan (*trust*) yang salah satunya dikemukakan oleh Coleman, 1986 mengenai modal sosial. Menurut Coleman, modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, rasa saling percaya dan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Kepercayaan pada politisi

Tionghoa bisa ditunjukkan dengan terpilihnya politisi pada penempatan Daerah Pilihan (Dapil) yang sesuai dan ditujukan bagi para politisi Tionghoa. Selain adanya pembentukan kepercayaan/*trust* dalam jaringan sosial, pembahasan ini juga menekankan pada hubungan kerja sama yang dinamis yang dilaksanakan atas dasar prinsip sukarela, kesamaan, kebebasan, dan keadilan. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa jaringan sosial berkaitan dengan ikatan sosial, kepercayaan, dan adanya hubungan timbal balik. Sehingga melalui jaringan sosial ini menunjukkan bahwasannya modal sosial yang secara *inherent* melekat pada jaringan sosial dapat memperlihatkan dinamika modal sosial yang dimiliki para politisi Tionghoa dalam sebuah kelompok masyarakat dan modal sosial yang dapat dimanfaatkan dalam hubungan dengan masyarakat.

### 2. Pembentukan Representasi melalui Jaringan Politik

Dalam jaringan politik ini melihat dalam konteks eksistensi etnis sebagai faktor dalam pembentukan, mobilisasi, dan fungsi jaringan kekuasaan. Identitas etnis dapat menjadi landasan representasi dan dinamika negosiasi politik. Jaringan politik yang dimaksud ialah Partai Politik, dan Elite Politik dan melalui jaringan politik ini pula eksistensi etnis dapat memainkan peran aktif dalam pembentukan di politik dan mempengaruhi kelompok etnis berinteraksi

dengan kelompok lain. Melalui adanya partai politik ini individu dari kelompok etnis dapat dicalonkan dalam pemilihan dan dengan menggunakan modal politik yang menjadi saluran efektif untuk memobilisasi dukungan dalam kontestasi politik dan mendapatkan akses ke sumber daya yang kemudian akan mendapat pengakuan dan partisipasi politik yang lebih besar. Sejalan dengan adanya politisi Tionghoa ini menjadi sebuah mobilisasi politik untuk tujuan politik bersama, dengan memberikan *feedback* dan adanya bentuk dukungan politik seperti suara dalam pemilihan atau partisipasi dalam aksi yang subjektif. Membahas mengenai adanya identitas politik kolektif ini juga merupakan sebuah bentuk jaringan yang terbentuk dari interaksi beberapa aktor di dalamnya, yang bahwasannya aktor ini tak hanya manusia, tetapi juga melibatkan aktor non-manusia. Melalui hal ini, dapat dikatakan bahwa jaringan politik yang terdapat interaksi antara politisi Tionghoa, pengurus partai, dan Pemerintah menunjukkan adanya efek dari jaringan yang terus dibangun dan dipelihara oleh beberapa aktor, baik aktor manusia dan non-manusia yang saling mendefinisikan kepentingan yang sejalan dan menunjukkan sifat yang dinamis dan relasional didalamnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa hal ini dapat menjadi sumber daya yang dapat dilakukan oleh politisi Tionghoa untuk meningkatkan dan

mempertahakan keaktoranannya dalam konteks politik.

### 3. Pemeliharaan Ekonomi dalam Jaringan Sosial

Salah satu hal lain yang mempengaruhi adanya eksistensi etnis yaitu dengan adanya kekuatan ekonomi yang dimiliki politisi Tionghoa dalam berjejaring. Dari hal itu juga tak sedikit timbul stereotip pada masyarakat etnis Tionghoa sebagai “kaya” dan “Pengusaha” yang kemudian melahirkan persepsi negatif di antara banyak orang bahwa mereka arogan, asosial, dan mendominasi ekonomi Indonesia (Coppe, 1983). Namun dari persepsi itu, kita bisa melihat sisi lain bahwa melalui adanya jaringan ekonomi yang terbentuk di dalam kelompok etnis itu sendiri dapat memperkuat solidaritas dan kohesi kelompok. Jaringan ekonomi ini pula terbentuk untuk membangun relasi bisnis, memberikan preferensi dalam transaksi, dan membentuk adanya kooperatif dalam bidang ekonomi. Berdasarkan hal tersebut dapat memperkuat adanya ikatan solidaritas internal kelompok dan melalui jaringan ini dapat berkontribusi pada pembentukan identitas kolektif. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai bentuk keberhasilan ekonomi dalam jaringan sebagai simbol kekuatan dan pembenaran representasi politik yang tercipta. Apabila kita bisa lihat bersama bahwa politisi Tionghoa yang didukung oleh jaringan ekonomi yang

dimiliki nya juga mempunyai kepentingan yang bertujuan untuk menyuarkan dan memperjuangkan aspirasi kelompok minoritas dalam politik dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan politik yang signifikan di Kota Semarang. Dengan adanya kolaborasi ekonomi dan politik dalam jaringan ini dapat meningkatkan citra dan kepercayaan diri kelompok etnis secara keseluruhan. Selain itu, keberhasilan ekonomi antara para Pengusaha dengan para politisi Tionghoa yang dapat menjadi modal sosial dan finansial untuk pelaksanaan kampanye politik dan menjadi sumber daya politik bagi para politisi Tionghoa.

## **KESIMPULAN**

Eksistensi politisi Tionghoa di Kota Semarang dibuktikan dengan indikator dalam Teori Eksistensi yakni melalui Representasi Politik, Partisipasi Politik, dan Akses terhadap Pembuat Kebijakan, dengan menggunakan pendekatan pada Teori Politik Identitas serta jejaring aktor pada Teori Jaringan Aktor dan dapat dijelaskan bahwa melalui pendekatan Primordialisme, para politisi Tionghoa menyadari dan menerima adanya identitas sebagai etnis Tionghoa yang berdampak pada Jaringan Sosial dengan terciptanya rasa kepercayaan (*trust*) dan kekerabatan pada masyarakat sesama Tionghoa lainnya. Selain melalui pendekatan Primordialisme, pendekatan Transaksionalisme yang dilakukan para

politisi Tionghoa dapat menciptakan adanya peluang kepercayaan pada masyarakat yang lebih luas dengan interaksi dan kegiatan politik yang dilakukan pada masyarakat majemuk. Kemudian pada pendekatan Instrumentalisme, para politisi Tionghoa melakukan mobilisasi politik kepada sesama Tionghoa sebagai bentuk penguatan identitas etnis untuk sumber daya politik.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan Primordialisme, pendekatan Transaksionalisme, dan pendekatan Instrumentalisme pada Politik Identitas dapat dikatakan mendukung para politisi Tionghoa untuk membangun jaringan dukungan melalui Jaringan Sosial dan Jaringan Politik yang kemudian dapat menciptakan Modal Sosial yang besar di antara sesama etnis Tionghoa dengan memanfaatkan adanya identitas dan solidaritas etnik yang membawa para politisi Tionghoa untuk eksis. Dan hasil dari proses transaksi politik menjadi sebuah Modal Politik yang melahirkan pandangan bahwa para politisi Tionghoa “merawat suara” dengan konstituen untuk dapat terpilih kembali. Dalam Jaringan Ekonomi pula menunjukkan adanya hubungan kekerabatan antara para politisi Tionghoa dengan pengusaha sesama Tionghoa yang dapat memperkuat rasa solidaritas dan identitas kelompok. Sehingga melalui Jaringan Ekonomi terbuka dan kolaboratif dapat

memperkuat posisi etnis Tionghoa sebagai bagian integral dari masyarakat Kota Semarang. Sehingga melalui adanya Representasi Politik yang tercipta melalui Partisipasi Politik dengan tujuan untuk

Akses terhadap Pembuatan Keputusan menjadikan para politisi Tionghoa untuk mampu merepresentasikan keberhasilan dan eksistensi para politisi Tionghoa.

## REFERENSI

- Alam, H. S. (2020). Eksistensi Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. *Skripsi, 1–12*.
- Bareilly, A. M. (2021). Kebertahanan Aktor Etnis Tionghoa pada Pemilihan Legislatif 2019 di Kota Makassar. *Tesis, 1–57*.
- Barth, F. (1988). *Kelompok-Kelompok Etnik dan Batasannya*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Bergh, P. Van Den. (1991). *Ethnicity and Nationalism : Theory and Comparison*. (hal. 299). *New Delhi : Sage Publication*.
- Callon, M. (1990). *Techno-economic Networks and Irreversibility* (hal. 132–161). *The Sociological Review*.
- Coleman, J. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *The American Journal of Sociology, 94*, S95–S120.
- De Araujo, E. X., Festianto, D., & Suni, M. (2024). KEKUASAAN (Studi Kasus Pilkades Di Desa Numponi Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka). *Jurnal Poros Politik, 6(1)*, 14–22. <https://doi.org/10.32938/jpp.v6i1.5650>
- Field, J. (2010). *Modal Sosial*. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Hogg, M., & Abrams, D. (1988). *Social Identifications: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes*. London : Routledge.
- Huberman, M., & B, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kusuma, Eddie, & Dharma, S. (2006). *Etnis Tionghoa Dalam Politik Indonesia Sebelum dan Sesudah Reformasi 1998*. Jakarta : Suara Kebangsaan Tionghoa Indonesia (SAKTI) dan Asosiasi Wartawan Muslim (AWAM) Indonesia.
- Nasrudin, J., & Nurdin, A. A. (2019). Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama, 1(1)*, 34–47. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v1i1.4260>